

# **Catatan Atas Laporan Keuangan**

## **Satuan Kerja BPTD KELAS II JAWA TENGAH TRIWULAN III TA 2024 KODE SATKER (403869)**

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2024



*Jl. Ahmad Yani No. 262  
(Komplek Terminal Tirtonadi)  
Surakarta, 57134  
Jawa Tengah*

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 31 Oktober 2024

Kepala Balai,



Ardono, ATD, MT

NIP. 196711121991031002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
Pernyataan Tanggung Jawab	2
Ringkasan	3
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran dan Daftar	45



## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan BPTD Kelas II Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024 *Unaudited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, 31 Oktober 2024

Kepala Balai,



Ardono, ATD, MT

NIP. 196711121991031002



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTD Kelas II Jawa Tengah 30 September 2024 (*Unaudited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp2.660.417.922,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) Realisasi Belanja Negara pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp200.792.055.584,- (dua ratus juta tujuh ratus Sembilan puluh dua juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) atau mencapai 70% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp287.347.462.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 September 2024 (*Unaudited*). Nilai Aset per 30 September 2024 (*Unaudited*) dicatat dan disajikan sebesar Rp1.426.753.427.375,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp61.056.415.269,- (enam puluh satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima belas dua ratus enam puluh Sembilan rupiah); Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.312.694.772.816,- (satu triliun tiga ratus dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah); dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp53.002.239.290,- (lima puluh tiga milyar dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah). Nilai Kewajiban sebesar Rp8.570.460.324 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua



puluh empat rupiah) yang terdiri dari: Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8.014.257.844,- (delapan miliar empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp256.202.480,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Nilai Ekuitas sebesar Rp1.418.182.967.051,- (satu trilyun empat ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah). Sehingga Total Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.426.753.427.375,- (satu trilyun empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp2.525.816.237,- (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp165.558.150.074,- (seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan seratus lima puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp163.032.333.837),- (minus seratus enam puluh tiga miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp1.899.662.402),- (minus satu miliar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan sebesar Rp0,- (nol) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp164.931.996.239),- (minus seratus enam puluh empat miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah).



#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.380.014.972.236,- (satu trilyun tiga ratus delapan puluh milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp164.931.996.239),- (minus seratus enam puluh empat miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp3.493.863.392,- (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp199.606.127.662,- (seratus Sembilan puluh Sembilan miliar enam ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp1.418.182.967.051 (satu trilyun empat ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah).

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAWA TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023  
(UNAUDITED)**

URAIAN	TRIWULAN III TA. 2024			TRIWULAN III TA. 2023
	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%REALISASI ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,168,114,000	2,660,417,922	122.71	13,330,649,664
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,168,114,000</b>	<b>2,660,417,922</b>	<b>122.71</b>	<b>13,330,649,664</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Pegawai	71,301,214,000	57,378,784,694	80.47	49,076,012,459
Belanja Barang	103,688,956,000	61,612,433,774	59.42	57,435,439,740
Belanja Modal	112,357,292,000	81,800,837,116	72.80	79,959,453,067
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>287,347,462,000</b>	<b>200,792,055,584</b>	<b>70</b>	<b>186,470,905,266</b>



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAWA TENGAH  
NERACA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 (UNAUDITED)  
DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)**

URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	-	100.00
Piutang Bukan Pajak	39,500	-	100.00
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	39,500	-	100.00
Persediaan	60,756,375,769	56,924,508,644	3.26
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>61,056,415,269</b>	<b>56,924,508,644</b>	<b>3.50</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	299,330,361,517	299,330,361,517	-
Peralatan dan Mesin	342,134,042,144	322,786,652,710	2.91
Gedung dan Bangunan	934,238,152,832	896,402,307,618	2.07
Jalan, Irigasi dan Jaringan	60,524,569,017	60,524,569,017	-
Aset Tetap Lainnya	224,000	224,000	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,532,827,188	28,193,612,900	27.45
AKUMULASI PENYUSUTAN	(373,065,403,882)	(346,715,748,387)	3.66
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,312,694,772,816</b>	<b>1,260,521,979,375</b>	<b>2.03</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	12,662,512,016	12,662,512,016	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	12,077,356,040	(100.00)
Aset Lain-Lain	183,554,725,381	187,153,188,012	(0.97)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(143,214,998,107)	(137,247,215,811)	2.13
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>53,002,239,290</b>	<b>74,645,840,257</b>	<b>(16.96)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,426,753,427,375</b>	<b>1,392,092,328,276</b>	<b>1.23</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	8,014,257,844	12,077,356,040	(20.22)
Utang Yang Belum Ditagihkan	256,202,480	-	100.00
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	-	100.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>8,570,460,324</b>	<b>12,077,356,040</b>	<b>(16.98)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>8,570,460,324</b>	<b>12,077,356,040</b>	<b>(16.98)</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	1,418,182,967,051	1,380,014,972,236	1.36
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,418,182,967,051</b>	<b>1,380,014,972,236</b>	<b>1.36</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,426,753,427,375</b>	<b>1,392,092,328,276</b>	<b>1.23</b>



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAWA TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN  
2023 (UNAUDITED)**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)
	2024	2023	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,525,816,237	2,190,282,810	7.11
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>2,525,816,237</b>	<b>2,190,282,810</b>	<b>7.11</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,525,816,237</b>	<b>2,190,282,810</b>	<b>7.11</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	62,177,151,363	51,111,699,957	9.77
Beban Persediaan	923,685,086	1,827,194,976	(32.84)
Beban Barang dan Jasa	36,255,035,110	44,096,907,753	(9.76)
Beban Pemeliharaan	5,461,588,451	8,694,473,155	(22.84)
Beban Perjalanan Dinas	7,764,271,241	6,460,696,935	9.16
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15,667,022,416	39,669,423,909	(43.38)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37,309,396,407	40,907,579,959	(4.60)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>165,558,150,074</b>	<b>192,767,976,644</b>	<b>(7.59)</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(163,032,333,837)</b>	<b>(190,577,693,834)</b>	<b>(7.79)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	<b>(2,009,353,587)</b>	<b>(6,428,435,064)</b>	(52.37)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	24,950,000	832,955,674	(94.18)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,034,303,587	7,261,390,738	(56.23)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>109,691,185</b>	<b>1,550,212,580</b>	(86.78)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109,691,185	1,550,212,580	(86.78)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(1,899,662,402)</b>	<b>- 4,878,222,484</b>	<b>(43.95)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(164,931,996,239)</b>	<b>(195,455,916,318)</b>	<b>(8.47)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	-	-	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(164,931,996,239)</b>	<b>(195,455,916,318)</b>	<b>(8.47)</b>



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAWA TENGAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023  
(UNAUDITED)**

URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) %
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1,380,014,972,236</b>	<b>1,724,606,586,163</b>	(19,98)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(164,931,996,239)	(195,455,916,318)	(15,62)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	3,493,863,392	6,520,037,114	(46,41)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,657,906,257	2,592,498,176	(36,05)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	1,220,484,797	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	615,472,338	3,927,538,938	(84,33)
LAIN-LAIN	-	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	199,606,127,662	(108,168,715,217)	(284,53)
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>38,167,994,815</b>	<b>(297,104,594,421)</b>	<b>(112,85)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1,418,182,967,051</b>	<b>1,427,501,991,742</b>	<b>(0,65)</b>



### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1 Profil, Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Jawa Tengah

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah merupakan salah satu unit eselon III yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPTD Kelas II Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;



- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
- Struktur Organisasi BPTD Kelas II Jawa Tengah, dapat digambarkan sebagai berikut:



## A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 (*unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTD Kelas II Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai



fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Laporan Keuangan BPTD Kelas II Jawa Tengah 30 September 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

### **A.3 Basis Akuntansi**

BPTD Kelas II Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat/

### **A.4 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTD Kelas II Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



## **A.5 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 September 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTD Kelas II Jawa Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTD Kelas II Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran**

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **2. Pendapatan – Laporan Operasional**

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;



- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **3. Belanja**

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **4. Beban**

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a) Aset Lancar**



- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b) Aset Tetap**

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - o Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - o Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset



berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



**c) Penyusutan Aset Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - o Tanah;
  - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d) Piutang Jangka Panjang**

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai



berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e) Aset Lainnya**

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun



- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**f) Kewajiban**

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**g) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan BPTD Kelas II Jawa Tengah untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp2.660.417.922. Realisasi Pendapatan di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Tengah, dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan  
sampai dengan 30 September 2024  
(dalam rupiah)*

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		Pendapatan	%
<b>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN</b>			-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	24,950,000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,739,110,000	2,277,660,817	130.97
<b>Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika</b>			
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	369,000,000	220,000,000	59.62
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	60,004,000	28,090,000	46.81
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	-	25,920	-
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>			-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	55,185,273	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	54,505,912	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,168,114,000</b>	<b>2,660,417,922</b>	<b>122.71</b>

Pendapatan PNB pada BPTD Kelas II Jawa Tengah berasal dari Pendapatan umum yang berasal dari pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.277.660.817 yang merupakan pendapatan dari sewa BMN pada Terminal Tipe A di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Tengah sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024.



## B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja BPTD Kelas II Jawa Tengah pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp200.792.055.584 atau 70% dari anggaran belanja sebesar Rp287.347.462.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

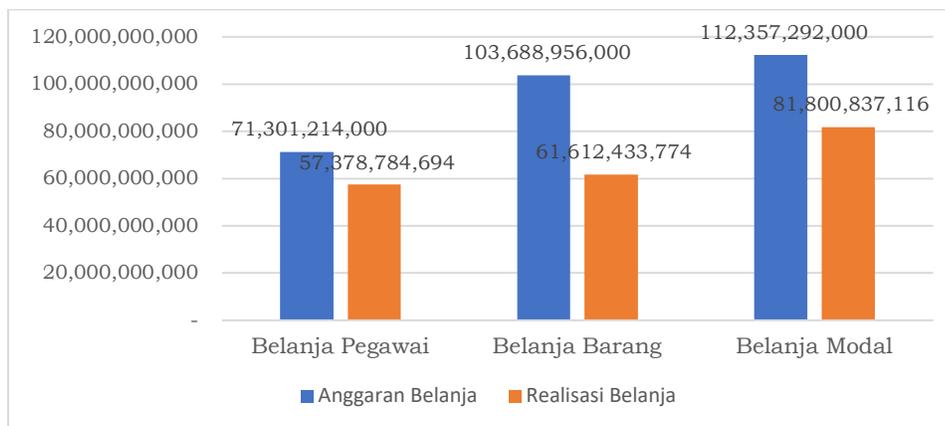
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2024*

Uraian	30 September 2024			30 September 2023	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	71,301,214,000	57,378,784,694	80.47	49,076,012,459	16.92
Belanja Barang	103,688,956,000	61,612,433,774	59.42	57,435,439,740	7.27
Belanja Modal	112,357,292,000	81,800,837,116	72.80	79,959,453,067	2.30
<b>Jumlah</b>	<b>287,347,462,000</b>	<b>200,792,055,584</b>	<b>69.88</b>	<b>186,470,905,266</b>	<b>7.68</b>

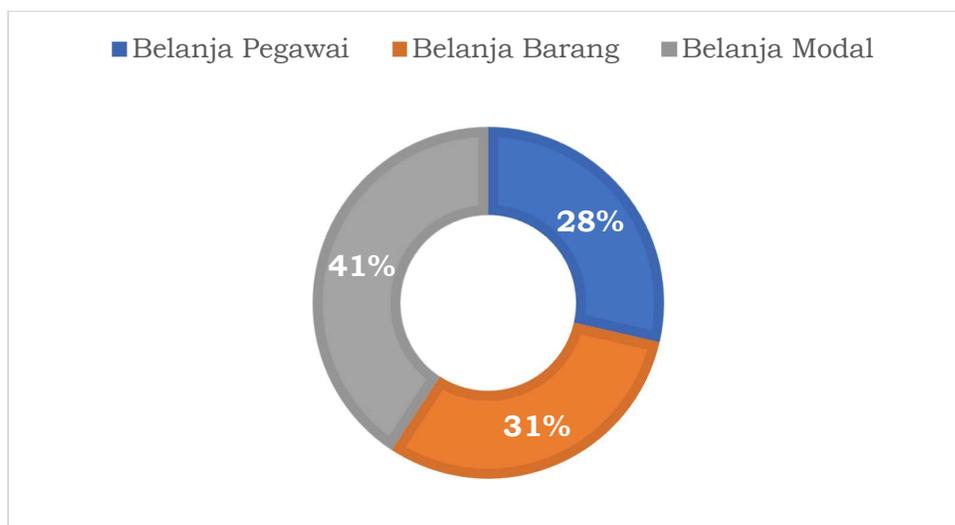
Realisasi belanja sampai dengan 30 September 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,68% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 30 September 2023.

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja  
sampai dengan 30 September 2024*



*Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja  
sampai dengan 30 September 2024*



### **B.3 BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp57.378.784.694 dan Rp49.076.012.459. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,69% dari 30 September 2023. Kenaikan belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Tengah.

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 30 September 2024 sebagai berikut:



*Realisasi Belanja Pegawai  
yang berakhir 30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024		% Realisasi Anggaran	30 September 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
I	2	3	4	5	6
<b>BELANJA PEGAWAI</b>					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	24,803,085,000	20,167,460,020	81.31	19,499,844,460	3.42
Belanja Pembulatan Gaji PNS	382,000	317,769	83.19	324,876	(2.19)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,738,604,000	1,492,019,260	85.82	1,524,696,947	(2.14)
Belanja Tunj. Anak PNS	467,165,000	394,724,724	84.49	396,238,527	(0.38)
Belanja Tunj. Struktural PNS	50,940,000	44,640,000	87.63	36,000,000	24.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	41,795,000	37,116,000	88.80	76,630,000	(51.56)
Belanja Tunj. PPh PNS	824,449,000	743,432,451	90.17	598,570,422	24.20
Belanja Tunj. Beras PNS	1,315,128,000	1,123,523,880	85.43	1,195,364,520	(6.01)
Belanja Uang Makan PNS	3,723,775,000	2,562,725,000	68.82	3,227,294,000	(20.59)
Belanja Tunj. Umum PNS	1,219,880,000	1,040,940,000	85.33	1,033,525,000	0.72
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>34,185,203,000</b>	<b>27,606,899,104</b>	<b>80.76</b>	<b>27,588,488,752</b>	<b>0.07</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
Belanja Gaji Pokok PPPK	2,810,647,000	2,325,010,700	82.72	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	63,000	53,188	84.43	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	147,379,000	131,390,980	89.15	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	36,211,000	30,805,654	85.07	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	236,400,000	195,225,000	82.58	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	164,684,000	139,987,860	85.00	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	606,375,000	392,805,000	64.78	-	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>4,001,759,000</b>	<b>3,215,278,382</b>	<b>80.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja Lembur	-	-	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	29,581,806,000	23,638,521,695	79.91	21,487,523,707	10.01
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,532,446,000	2,918,085,513			
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>33,114,252,000</b>	<b>26,556,607,208</b>	<b>80.20</b>	<b>21,487,523,707</b>	<b>23.59</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>71,301,214,000</b>	<b>57,378,784,694</b>	<b>80.47</b>	<b>49,076,012,459</b>	<b>16.92</b>

#### **B.4 BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.612.433.774 dan Rp57.435.439.740. Realisasi Belanja Barang 30 September 2024 mengalami kenaikan 7,27% dari Realisasi Belanja Barang 30 September 2023. Kenaikan signifikan terdapat pada Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar (1.569%). Rincian Belanja Barang sampai dengan 30 September 2024 sebagai berikut:



*Realisasi Belanja Barang  
yang berakhir 30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024		% Realisasi Anggaran	30 September 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA BARANG</b>					
Belanja Barang Operasional	28,438,736,000	18,154,449,552	63.84	21,789,733,429	(16.68)
Belanja Barang Non Operasional	10,824,536,000	5,129,942,666	47.39	10,370,086,465	(50.53)
Belanja Barang Persediaan	2,127,282,000	1,189,694,376	55.93	1,070,496,556	11.13
Belanja Jasa	17,823,296,000	10,880,997,376	61.05	9,062,915,289	20.06
Belanja Pemeliharaan	14,253,557,000	5,054,071,718	35.46	7,871,511,066	(35.79)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12,552,486,000	7,678,790,795	61.17	6,460,696,935	18.85
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	17,669,063,000	13,524,487,291	76.54	810,000,000	1,569.69
<b>Jumlah</b>	<b>103,688,956,000</b>	<b>61,612,433,774</b>	<b>59.42</b>	<b>57,435,439,740</b>	<b>7.27</b>

## **B.5 BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp81.800.837.116 dan Rp79.959.453.067. Realisasi Belanja Modal 30 September 2024 mengalami kenaikan 2,30% dari Realisasi Belanja Modal 30 September 2023.

*Realisasi Belanja Modal  
yang berakhir 30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024		% Realisasi Anggaran	30 September 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	-	-	-	8,214,975	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,682,982,000	20,460,274,606	66.68	31,971,609,110	(36.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81,674,310,000	61,340,562,510	75.10	47,979,628,982	27.85
<b>Jumlah</b>	<b>112,357,292,000</b>	<b>81,800,837,116</b>	<b>72.80</b>	<b>79,959,453,067</b>	<b>2.30</b>

### **B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp20.460.274.606 dan Rp31.971.609.110. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya



pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar 23,82% dibandingkan 30 September 2023.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 September 2024 sebagai berikut:

Uraian	30 September 2024		% Realisasi Anggaran	30 September 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,682,982,000	20,460,274,606	66.68	31,971,609,110	(36.00)
<b>Jumlah</b>	<b>30,682,982,000</b>	<b>20,460,274,606</b>	<b>66.68</b>	<b>31,971,609,110</b>	<b>(36.00)</b>

### ***B.5.2. Belanja Modal lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat di kategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 September 2024 sebagai berikut:

Uraian	30 September 2024		% Realisasi Anggaran	30 September 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA MODAL LAINNYA</b>					
Belanja Modal lainnya	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **C. PENJELASAN ATAS POS NERACA**

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 30 September Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp 300,000,000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

### **C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah.

### **C.3 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing adalah sebesar Rp39.500 dan Rp0 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah.

### **C.1 Persediaan**

Nilai Persediaan periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing adalah sebesar Rp60.756.375.769 dan Rp56.924.508.644. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) mengalami kenaikan sebesar 5,96%. Kenaikan signifikan terdapat pada saldo akun Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat yaitu sebesar Rp3.215.102.163 yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa Halte Bus Kota Magelang TA. 2022.



Rincian Persediaan periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan  
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 (audited)  
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2024	2023 (audited)	Jumlah	%
Barang Konsumsi	839,986,054	1,134,843,968	(294,857,914)	(25.98)
Bahan untuk Pemeliharaan	28,616,609	34,195,458	(5,578,849)	(16.31)
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5,272,126,163	2,057,024,000	3,215,102,163	156.30
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33,846,728,374	33,110,696,749	736,031,625	2.22
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	19,441,328,469	19,698,728,469	(257,400,000)	(1.31)
Bahan Baku	1,640,000	-	1,640,000	-
Persediaan Lainnya	889,020,000	889,020,000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>60,319,445,669.00</b>	<b>56,924,508,644.00</b>	<b>3,394,937,025.00</b>	<b>5.96</b>

## C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTD Kelas II Jawa Tengah periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar Rp299,330,361,517 dan Rp299,330,361,517. Saldo akhir Tanah per 30 September 2024 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagaimana terlampir.

*Rincian Aset berupa Tanah*

No	Nama Barang	Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Giri Adipura Wonogiri	679,440,000	2022-03-24
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Giri Adipura Wonogiri	179,861,786	2022-03-24
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Giri Adipura Wonogiri	268,572,229	2022-03-24
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Tidar Magelang	19,779,690,975	1988-12-31
5	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Mangkang Kota Semarang	38,337,900,000	2009-12-31
6	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Cepu Kab. Blora	25,524,089,760	2015-12-31
7	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bawen Kab. Semarang	5,425,000,000	1950-12-31
8	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pekalongan	3,584,495,738	2002-12-31
9	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Kebumen	869,086,736	2003-12-31
10	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Kebumen	379,846,847	2003-12-31
11	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pemalang	15,851,870,000	1996-12-31
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Terminal Bobotsari Kab. Purbalingga	232,438,000	2003-12-31



13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Terminal Bobotsari Kab. Purbalingga	1,955,599,561	2013-12-31
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Terminal Bobotsari Kab. Purbalingga	12,400,000	2016-12-31
15	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Mendolo Kab. Wonosobo	5,863,800,000	1995-12-31
16	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Purworejo	373,376,000	2012-12-31
17	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Purworejo	496,000,000	2010-01-15
18	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	2,305,360,000	2013-12-31
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	574,150,000	1993-12-31
20	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	299,016,000	2015-12-31
21	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	683,400,000	1993-12-31
22	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	373,400,000	1993-12-31
23	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	2,025,400,000	1994-12-31
24	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	54,982,138,000	2007-12-31
25	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Terminal Tirtonadi Kota Surakarta	11,800,400,000	2007-12-31
26	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Tingkir Salatiga	275,900,540	1996-12-31
27	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Tingkir Salatiga	399,930,800	1996-12-31
28	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bangga Mbangun Desa Cilacap	89,797,825	2003-12-31
29	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	293,600	2018-03-12
30	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	16,279,440	2018-03-12
31	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	504,640	2018-03-12
32	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	109,200	2018-03-12
33	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	1,270,570,000	2002-12-31
34	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	120,750,000	2002-12-31
35	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	2,655,590,000	2002-12-31
36	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Bulupitu Kab. Banyumas	60,595,686,000	2003-12-31
37	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Subah Kab. Batang	1,700,050,000	1984-12-31
38	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Sambong Kab. Blora	1,250,000,000	2000-12-31
39	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Banyudono Kab. Boyolali	1,650,000,000	1980-12-31
40	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Tanjung Kab. Brebes	2,375,000,000	1974-12-31
41	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Wanareja Kab. Cilacap	1,478,062,240	1979-12-31
42	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Gubug Kab. Grobogan	1,548,000,000	1987-12-31
43	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Lebuawu Kab. Jepara	1,180,477,600	1984-12-31
44	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Salam Kab. Magelang	1,238,250,000	1978-12-31
45	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Ajibarang Kab. Banyumas	1,196,628,400	1981-12-31
46	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Sarang Kab. Rembang	2,301,750,000	1980-12-31
47	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Sarang Kab. Rembang	373,500,000	1980-12-31
48	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Klepu Kab. Semarang	1,250,000,000	1979-12-31
49	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Toyogo Kab. Sragen	1,788,750,000	1999-12-31
50	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Pringsurat Kab. Temanggung	1,400,000,000	1980-12-31
51	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	UPPKB Selogiri Kab. Wonogiri	2,362,500,000	1978-12-31
52	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Demak	13,953,969,600	2017-04-26
53	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Tegal	4,001,280,000	2002-12-31
<b>Total</b>			<b>299,330,361,517</b>	

### C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar Rp342.134.042.144



dan Rp322.786.652.710. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Uraian Transaksi</b>	<b>Nilai</b>
000	Saldo Awal	1.572.426.500
101	Pembelian	2.558.360.095
102	Transfer Masuk	1.503.480.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(15.357.374.511)
301	Penghapusan	(46.225.172)
303	Hibah Keluar	(12.200.000)
305	Koreksi Pencatatan	(1.572.426.500)
393	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(495.106.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13.400.000)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(1.133.685.000)
921	Internal Transfer Keluar	(18.477.342.950)
922	Internal Transfer Masuk	18.477.342.950

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin diantaranya:

- a. Transfer masuk berupa Taman Edukasi pada Terminal Tipe A Tirtonadi dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan Partisi Kios pada Terminal Tipe A Purworejo sebanyak 36 buah senilai Rp747.000.000 dan Terminal Tipe A Mendolo, Kab. Wonosobo sebanyak 22 buah senilai Rp456.500.000 dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- b. Penyelesaian Pembangunan KDP Peralatan dan Mesin senilai Rp15.357.374.511, diantaranya:
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 008 Bts. Kota Batang - Bts Kab. Kendal senilai Rp460.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 079.11.K Jl. Lingkar Bumiayu (Jl. Fatmawati) senilai Rp460.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 027 Bts. Prov. Jabar - Karangpucung (Bts. Kab. Cilacap-Banyumas) senilai Rp1.104.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 062-066 Sp. 3 Jeruk Legi - Sampang senilai Rp1.150.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 029 Wangon - Menganti dan Ruas 033 Buntu - Banyumas senilai Rp1.196.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75x75 Ruas 023, 024, 027, 028, 029, 043 - 047, 078 dan 087 senilai Rp110.400.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ruas 025 - 026, 110, 027, 071 - 072, 109.1 - 109.4 senilai Rp360.541.836;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Simpang PDAM Kab. Temanggung senilai Rp490.000.000;



- Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Simpang Pare Bengkal Kab. Temanggung senilai Rp490.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Simpang Masaran Kab. Sragen senilai Rp490.886.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 4.2.2 Simpang OBL Kab. Temanggung senilai Rp625.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Ruas 055, 090-091, 051, 004-006 senilai Rp840.800.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 080 Bts. Kab. Brebes/Banyumas – Ajibarang senilai Rp460.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Simpang Dukuh Salam Slawi senilai Rp492.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Simpang Yomani Kab. Tegal senilai Rp492.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Ruas 008 Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal senilai Rp492.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 3.2.2 Ruas 068 Bts. Banyumas/Kebumen - Sp.3 Barat senilai Rp492.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang Tiga Tipe 4.2.2 Simpang Sawangan Kabupaten Wonosobo senilai Rp625.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 099 - 100 Sp.3 Tol Pejagan Kanco – Prupuk senilai Rp1.012.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas 078, 043 - 045 dan 027 senilai Rp1.242.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Konvensional Ruas 087 078.1, 043 - 047 dan 028 senilai Rp412.000.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron Ukuran 75x60 Ruas Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah senilai Rp108.346.675;
  - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Papan LRK 120x240 Ruas 087, 078.1, 043-045, 029, 028 dan 027 senilai Rp282.100.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 75x75 Ruas Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah senilai Rp524.400.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Ruas 040, 049, 088, 025-026, 023, 024 senilai Rp945.900.000.
- c. Koreksi pencatatan nilai bertambah berupa Kapitalisasi Aset Tanah dengan Biaya Sertifikasi Tanah Terminal Tipe A dan UPPKB pada Satuan Kerja BPTD Kelas II Jawa Tengah serta Kapitalisasi Gedung dan Bangunan Terminal Tipe



A Tingkir.

- d. Penghapusan peralatan dan mesin berupa kursi, sketsel, fingerprint, dan grid senilai Rp46.225.172;
- e. Hibah keluar peralatan dan mesin berupa papan nama ke Pemerintah Kota Yogyakarta senilai Rp12.200.000;
- f. Koreksi pencatatan peralatan dan mesin berupa Alat Kalibrasi senilai Rp1.498.000.000 dan Meja Kerja Kayu senilai Rp74.426.500;
- g. Hibah keluar (BMN yang dihentikan) Peralatan dan Mesin berupa Rambu Suar ke Pemerintah Kota Jepara senilai Rp495.106.000;
- h. Penghentian asset dari penggunaan peralatan dan mesin berupa Gerobak Dorong, Mesin Absensi, Kursi Besi, dan Kursi Plastik untk diusulkan penghapusan senilai Rp13.400.000;
- i. Koreksi pencatatan KDP berupa Uang Muka Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya Lengan Tunggal Kabupaten Semarang karena terdapat salah kode barang seharusnya menggunakan kode barang persediaan senilai Rp1.133.685.000;
- j. Internal Transfer Keluar Transfer Masuk Peralatan dan Mesin untuk menyesuaikan lokasi asset senilai Rp18.477.342.950.

#### **C.4 Gedung dan Bangunan**

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar Rp934.238.152.832 dan Rp896,402,307,618. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Uraian Transaksi</b>	<b>Nilai</b>
000	Saldo Awal	3.215.185.271
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	43.692.923.135
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	30.641.209.000
214	Koreksi Susulan	24.530.969.000
301	Penghapusan	(5.246.122.108)
305	Koreksi Pencatatan	(58.387.280.163)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(3.215.185.271)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.641.975.758)
921	Internal Transfer Keluar	(336.097.790.149)
922	Internal Transfer Masuk	336.097.790.149

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan diantaranya:

- a. Saldo Awal Gedung dan Bangunan berupa Halte Bus Kota Magelang TA. 2022



- senilai Rp3.215.185.271;
- b. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Gedung dan Bangunan senilai Rp43.692.923.135, berupa:
    - Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo senilai Rp9.543.963.958;
    - Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Tidar senilai Rp14.414.809.648; dan
    - Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Cepu senilai Rp19.734.149.529.
  - c. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung dan Bangunan yaitu berupa kapitalisasi asset Gedung dan Bangunan berupa Rehabilitasi Terminal Tipe A Tingkir senilai Rp30.641.209.000;
  - d. Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan berupa Kapitalisasi Aset Bangunan Gedung Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri senilai 24.560583.500;
  - e. Penghapusan Gedung dan Bangunan karena lelang bongkaran senilai Rp(5.246.122.108);
  - f. Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan karena pecah asset Halte Bus Kota Magelang TA. 2022 senilai Rp(58.387.280.163) dan Kapitalisasi Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp(55.172.178.000) pada Terminal Tipe A Tingkir Salatiga dan Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri;
  - g. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan Gedung dan Bangunan berupa Halte Bus Kota Magelang TA. 2022;
  - h. Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan karena akan diusulkan penghapusan senilai Rp(2.641.975.758);
  - i. Internal Transfer Keluar Transfer Masuk Gedung dan Bangunan karena terdapat penyesuaian lokasi anak satker senilai Rp(336.097.790.149).

### **C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar Rp60.524.569.017 dan Rp60,524,569,017. Saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024 tidak mengalami perubahan.

### **C.6 Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah Rp224,000 dan Rp224,000. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan



aringan. Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 tidak terdapat perubahan.

### C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah Rp49.532.827.188 dan Rp28.193.612.900. Rincian C.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian KDP  
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2022  
(dalam rupiah)*

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KDP (Rp)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(14)
1	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Tanjung	40	PL.102/3/16/PPK1-BPTDJTG/VI/2024	6/24/2024	20/12/2024	4,925,000,000
2	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Banyudono	41	PL.102/3/17/PPK1-BPTDJTG/VI/2024	6/24/2024	20/12/2024	4,946,721,055
3	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	42	PL.102/4/11/PPK1-BPTDJTG/VI/2024	27/06/2024	23/12/2024	11,680,000,000
4	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari	23	PL.102/12/01/PPK4/BPTD-X/2020	18/12/2020	31/12/2022	35,135,024,000

### C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing (Rp373.065.403.882) dan (Rp346.715.748.387). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:



*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
per 30 September 2024  
(dalam rupiah)*

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	299,330,361,517	-	299,330,361,517
2	Peralatan Mesin	342,134,042,144	(216,561,219,607)	125,572,822,537
3	Gedung dan Bangunan	934,238,152,832	(131,329,199,442)	802,908,953,390
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	60,524,569,017	(25,174,984,833)	35,349,584,184
5	Aset Tetap Lainnya	224,000	-	224,000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,532,827,188	-	49,532,827,188
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,685,760,176,698</b>	<b>(373,065,403,882)</b>	<b>1,312,694,772,816</b>

### C.9 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp12,662,512,016 dan Rp12,662,512,016. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud  
per 30 September 2024  
(dalam rupiah)*

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1	Hasil Kajian/Penelitian	12,397,143,146
2	Software Komputer	222,728,870
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	42,640,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,662,512,016</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	12,662,512,016
	<b>Jumlah</b>	<b>12,662,512,016</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 tidak mengalami perubahan.



### C.10 Aset Lain-Lain

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar Rp183.554.725.381 dan Rp187.153.188.012. Saldo Aset Lain-Lain per 30 September 2024 tidak mengalami perubahan.

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Uraian Transaksi</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
000	Saldo Awal	187,153,188,012
	<b>Jumlah</b>	<b>187,153,188,012</b>

### C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) masing-masing sebesar (Rp143.214.998.107) dan (Rp137,247,215,811).

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya  
per 30 September 2024  
(dalam rupiah)*

<b>NO</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>NILAI PEROLEHAN</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>NILAI BUKU</b>
1	Aset Tak Berwujud	12,662,512,016	(139,205,545)	12,523,306,471
2	Ase Lain-Lain	183,554,725,381	(143,075,792,562)	40,478,932,819
	<b>JUMLAH</b>	<b>196,217,237,397</b>	<b>(143,214,998,107)</b>	<b>53,002,239,290</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

### C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp8.014.257.844 dan Rp12,077,356,040 pada Balai Pengelola Transportasi Kelas II Jawa Tengah.



### **C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp256.202.480 dan Rp0 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah.

### **C.14 Uang Muka dari KPPN**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp0 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah.

### **C.15 Ekuitas**

Nilai Ekuitas Periode 30 September Tahun 2024 (*unaudited*) dan 31 Desember 2023 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp1.387.899.032.497 dan Rp1.418.182.967.051. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah untuk Periode 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.525.816.237 dan Rp2.190.282.810. Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar 99% dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024	30 September 2023	% Naik (Turun)
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
<b>Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN</b>			
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	527,000,000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	2,175,000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	24,950,000	303,780,674	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2,277,660,817	1,924,278,740	18.36
<b>Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN</b>	<b>2,302,610,817</b>	<b>2,757,234,414</b>	<b>(16.49)</b>
<b>Pendapatan Jasa</b>			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan			-
Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			-
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	220,000,000	213,000,000	3.29
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan			-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	28,090,000	53,004,070	(47.00)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	25,920	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Jasa</b>	<b>248,115,920</b>	<b>266,004,070</b>	<b>(6.7)</b>
<b>Pendapatan Denda</b>			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan			-
Pendapatan Denda Lainnya			-
<b>Jumlah Pendapatan Denda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	80	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	54,505,912	10,307,411,100	(99.47)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	55,185,273	-	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>109,691,185</b>	<b>10,307,411,100</b>	<b>(98.94)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2,660,417,922</b>	<b>13,330,649,584</b>	<b>(80.04)</b>



## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai Periode 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp62.177.151.363 dan Rp51.111.699.957. Belanja tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024	30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	21,943,648,800	21,169,802,120	0.04
Beban Pembulatan Gaji PNS	343,832	351,454	(0.02)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,623,991,010	1,655,085,380	(0.02)
Beban Tunj. Anak PNS	429,304,288	430,456,246	(0.00)
Beban Tunj. Struktural PNS	49,140,000	39,420,000	0.25
Beban Tunj. Fungsional PNS	40,401,000	83,655,000	(0.52)
Beban Tunj. PPh PNS	798,127,588	598,610,970	0.33
Beban Tunj. Beras PNS	1,222,884,120	1,298,056,080	(0.06)
Beban Uang Makan PNS	2,562,725,000	3,227,294,000	(0.21)
Beban Tunjangan Umum PNS	1,132,910,000	1,121,445,000	0.01
Beban Gaji Pokok PPPK	2,535,451,700	21,487,523,707	(0.88)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	57,569	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	144,325,470	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	33,602,710	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	212,900,000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	152,951,040	-	-
Beban Uang Makan PPPK	392,805,000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	25,723,737,727	-	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,177,844,509	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>62,177,151,363</b>	<b>51,111,699,957</b>	<b>0.22</b>



### **D.3 Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp923.685.086 dan Rp1.827.194.976

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.255.035.110 dan Rp44.096.907.753. Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar 25,49% dibandingkan dengan 30 September 2023.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2024</b>	<b>30 September 2023</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Keperluan Perkantoran	19,839,892,536	22,624,956,679	- 12
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,754,432	9,455,300	14
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	135,352,000	268,540,000	- 50
Beban Barang Operasional Lainnya	140,480,200	764,342,450	- 82
Beban Bahan	36,476,500	1,678,800	2,073
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	40,860,000	- 80
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,170,222,066	11,141,704,875	- 54
Beban Langganan Listrik	471,726,786	35,153,815	1,242
Beban Langganan Telepon	47,562,293	1,855,200	2,464
Beban Langganan Air	35,219,585	3,999,810	781
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,352,328,730	6,471,493,342	- 17
Beban Sewa	1,255,515,982	2,718,634,482	- 54
Beban Jasa Profesi	14,400,000		-
Beban Jasa Lainnya	3,704,244,000		-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7,200,000	13,650,000	- 47
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	25,500,000	583,000	4,274
<b>Jumlah</b>	<b>36,255,035,110</b>	<b>44,096,907,753</b>	<b>(17.78)</b>

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.461.588.451 dan Rp 8.694.473.155.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 September 2024 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2024</b>	<b>30 September 2023</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,199,840,463	4,303,564,402	(72.12)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,824,410,625	3,775,874,000	1.29
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3,561,000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	62,184,630	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	403,534,033	614,804,103	(34.36)
Beban Persediaan suku cadang	-	230,650	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>5,493,530,751</b>	<b>8,694,473,155</b>	<b>(36.82)</b>



## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7.764.271.241 dan Rp6.460.696.935.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024	30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	7,113,145,241	6,383,696,935	11.43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	451,200,000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,926,000	77,000,000	159.64
<b>Jumlah</b>	<b>7,764,271,241</b>	<b>6,460,696,935</b>	<b>20.18</b>

## D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.667.022.416 dan Rp39.669.423.909 pada Balai Pengelola Transpotasi Darat Kelas II Jawa Tengah.

*Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

Uraian	30 September 2024	30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	15,538,322,416	22,325,436,746	(30.40)
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	257,400,000	742,350,000	(65.33)
Beban persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	16,601,637,163	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>15,795,722,416</b>	<b>39,669,423,909</b>	<b>(60.18)</b>



## D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 37.309.396.407 dan Rp 40.907.579.959.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2024 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2024</b>	<b>30 September 2023</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,580,067,498	20,214,311,174	(8.08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,604,511,365	11,328,098,946	(15.22)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,351,312,510	1,357,914,147	(0.49)
Beban Penyusutan Irigasi	280,845,833	294,456,127	(4.62)
Beban Penyusutan Jaringan	12,466,652	13,646,705	(8.65)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Amortisasi Paten			-
Beban Amortisasi Software	27,841,109	27,841,109	-
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7,452,351,440	7,671,311,751	(2.85)
<b>Jumlah</b>	<b>37,309,396,407</b>	<b>40,907,579,959</b>	<b>(8.80)</b>

## D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional  
30 September 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2024</b>	<b>30 September 2023</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	24,950,000	832,955,674	(97.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,034,303,587	7,261,390,738	(71.98)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	109,691,185	1,550,212,580	(92.92)
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>2,168,944,772</b>	<b>9,644,558,992</b>	<b>(77.51)</b>



## **E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,380,014,972,236 dan Rp1,724,606,586,163.

### **E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp164.931.996.239) dan (Rp195.455.916.318) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS**

#### ***E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar***

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 sebesar Rp0,00.

#### ***E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset***

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

#### ***E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan***

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.657.906.257 dan Rp2.592.498.176.



### ***E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi***

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.220.484.797 dan Rp0,00

### ***E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap***

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### ***E.3.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi***

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp615.472.338 dan Rp3.927.538.938

### ***E.3.7 Koreksi Lain-Lain***

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

## **E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp199.606.127.662 dan (Rp108.168.715.217). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.



## Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

30 September 2024

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	200,792,055,584
Diterima dari Entitas Lain	- 2,660,417,922
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1,474,490,000
Pengesahan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>199,606,127,662</b>

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
1. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

### ***E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)***

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2024, DDEL sebesar (Rp2.660.417.922) sedangkan DKEL sebesar Rp200.792.055.584.



#### ***E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar***

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp1.474.490.000 Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp0.

#### ***E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung***

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp0.

### **E.5 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.418.182.967.051 dan Rp1.427.501.991.742.



## F. CATATAN-CATATAN PENTING LAINNYA

Pada aplikasi MonSAKTI terdapat kesalahan pencatatan pemilihan kode barang/kode akun pada Aplikasi SAKTI Modul Komitmen pada saat perekaman BAST yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga muncul Daftar Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN sebanyak 1 (satu) transaksi sebagai berikut:

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	BAST KONTRAKTUAL	KU.003/4/17/PPK2-BPTDIATENG/III/2024	27-03-2024	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	PENGADAAN DAN PEMASANGAN APJ TENAGA SURYA LENGAN TUNGGAL KAB. SEMARANG	7010101002	105	10,797,000	1,133,685,000	240281302001049





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022  
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 03  
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH 403869

Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM  
Tgl Cetak : 10/10/24 3:11 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	287,347,462,000	200,792,055,584	(86,555,406,416)	70	298,924,003,000	186,470,905,266	112,453,097,734	62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Surakarta, 10 Oktober 2024

Perangguno Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

ARDINO ATD., M.T.

NIP 196311121991031002

## NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA  
TENGAH

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 3:36 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	39,500	0	39,500	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	39,500	0	39,500	0.00
Persediaan	60,756,375,769	56,924,508,644	3,831,867,125	6.73
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>61,056,415,269</b>	<b>56,924,508,644</b>	<b>4,131,906,625</b>	<b>7.26</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	299,330,361,517	299,330,361,517	0	0.00
Peralatan dan Mesin	342,134,042,144	322,786,652,710	19,347,389,434	5.99
Gedung dan Bangunan	934,238,152,832	896,402,307,618	37,835,845,214	4.22
Jalan, Irigasi dan Jaringan	60,524,569,017	60,524,569,017	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	224,000	224,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,532,827,188	28,193,612,900	21,339,214,288	75.69
AKUMULASI PENYUSUTAN	(373,065,403,882)	(346,715,748,387)	(26,349,655,495)	7.60
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,312,694,772,816</b>	<b>1,260,521,979,375</b>	<b>52,172,793,441</b>	<b>4.14</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	12,662,512,016	12,662,512,016	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	12,077,356,040	(12,077,356,040)	(100.00)
Aset Lain-lain	183,554,725,381	187,153,188,012	(3,598,462,631)	(1.92)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(143,214,998,107)	(137,247,215,811)	(5,967,782,296)	4.35
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>53,002,239,290</b>	<b>74,645,840,257</b>	<b>(21,643,600,967)</b>	<b>(29.00)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,426,753,427,375</b>	<b>1,392,092,328,276</b>	<b>34,661,099,099</b>	<b>2.49</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,014,257,844	12,077,356,040	(4,063,098,196)	(33.64)
Utang Yang Belum Ditagihkan	256,202,480	0	256,202,480	0.00
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>8,570,460,324</b>	<b>12,077,356,040</b>	<b>(3,506,895,716)</b>	<b>(29.04)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>8,570,460,324</b>	<b>12,077,356,040</b>	<b>(3,506,895,716)</b>	<b>(29.04)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	1,418,182,967,051	1,380,014,972,236	38,167,994,815	2.77
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,418,182,967,051</b>	<b>1,380,014,972,236</b>	<b>38,167,994,815</b>	<b>2.77</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,418,182,967,051</b>	<b>1,380,014,972,236</b>	<b>38,167,994,815</b>	<b>2.77</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,426,753,427,375</b>	<b>1,392,092,328,276</b>	<b>34,661,099,099</b>	<b>2.49</b>

NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 SEPTEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA  
TENGAH

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM  
Tgl Cetak : 10/10/24 3:36 PM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Keterangan :  
FINAL



Surakarta, 10 Oktober 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

ARDONO, ATD., M.T.  
NIP 196711121991031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH

Tgl Data : 10/10/24 12:39 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 3:20 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,525,816,237	2,190,282,810	335,533,427	15.319
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,525,816,237	2,190,282,810	335,533,427	15.319
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,525,816,237	2,190,282,810	335,533,427	15.319
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	62,177,151,363	51,111,699,957	11,065,451,406	21.65
Beban Persediaan	923,685,086	1,827,194,976	(903,509,890)	(49.448)
Beban Barang dan Jasa	36,255,035,110	44,096,907,753	(7,841,872,643)	(17.783)
Beban Pemeliharaan	5,461,588,451	8,694,473,155	(3,232,884,704)	(37.183)
Beban Perjalanan Dinas	7,764,271,241	6,460,696,935	1,303,574,306	20.177
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15,667,022,416	39,669,423,909	(24,002,401,493)	(60.506)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH

Tgl Data : 10/10/24 12:39 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 3:20 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37,309,396,407	40,907,579,959	(3,598,183,552)	(8.796)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	165,558,150,074	192,767,976,644	(27,209,826,570)	(14.115)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(163,032,333,837)	(190,577,693,834)	27,545,359,997	(14.454)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,009,353,587)	(6,428,435,064)	4,419,081,477	(68.743)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	24,950,000	832,955,674	(808,005,674)	(97.005)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,034,303,587	7,261,390,738	(5,227,087,151)	(71.985)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109,691,185	1,550,212,580	(1,440,521,395)	(92.924)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109,691,185	1,550,212,580	(1,440,521,395)	(92.924)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,899,662,402)	(4,878,222,484)	2,978,560,082	(61.058)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(164,931,996,239)	(195,455,916,318)	30,523,920,079	(15.617)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(164,931,996,239)	(195,455,916,318)	30,523,920,079	(15.617)

Keterangan :

FINAL

Surakarta, 10 Oktober 2024

Peranggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARDONO, ATD., M.T.

NIP. 196711121991031002

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA  
TENGAH

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 3:27 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,380,014,972,236	1,724,606,586,163	(344,591,613,927)	(19.98)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(164,931,996,239)	(195,455,916,318)	30,523,920,079	(15.62)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	3,493,863,392	6,520,037,114	(3,026,173,722)	(46.41)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,657,906,257	2,592,498,176	(934,591,919)	(36.05)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	1,220,484,797	0	1,220,484,797	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	615,472,338	3,927,538,938	(3,312,066,600)	(84.33)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	199,606,127,662	(108,168,715,217)	307,774,842,879	(284.53)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	38,167,994,815	(297,104,594,421)	335,272,589,236	(112.85)
EKUITAS AKHIR	1,418,182,967,051	1,427,501,991,742	(9,319,024,691)	(0.65)

Keterangan :

FINAL

Surakarta, 10 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARDONO, ATD., M.T.

NIP 196711121991031002

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA  
TENGAH

Tgl Data : 29/10/24 12:40 AM

Tgl Cetak : 29/10/24 10:27 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,657,906,257
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	615,472,338
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	1,220,484,797
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	24,950,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,277,700,317
3.0	425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	220,000,000
3.0	425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	28,090,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	25,920
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	55,185,273
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,505,912
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	21,943,648,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	343,832	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,623,991,010	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	429,304,288	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	49,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	40,401,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	798,127,588	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,222,884,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,562,725,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,132,910,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,535,451,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	57,569	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	144,325,470	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	33,602,710	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	212,900,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	152,951,040	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	392,805,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	25,723,737,727	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,177,844,509	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	19,839,892,536	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,754,432	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	135,352,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	140,480,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	36,476,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,170,222,066	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	25,500,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	471,726,786	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 403869 ) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH

Tgl Data : 29/10/24 12:40 AM

Tgl Cetak : 29/10/24 10:27 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	47,562,293	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	35,219,585	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,352,328,730	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,255,515,982	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	14,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,704,244,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,199,840,463	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,824,410,625	0
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3,561,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	62,184,630	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,113,145,241	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	451,200,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	199,926,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,580,067,498	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,604,511,365	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,351,312,510	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	280,845,833	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	12,466,652	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	27,841,109	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7,452,351,440	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,194,364,886	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	403,534,033	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	15,538,322,416	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	257,400,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	5,608,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7,200,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,034,303,587	0
JUMLAH			2,113,286,700,947	2,113,286,700,947

Keterangan :

FINAL

Surakarta, 29 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARDONO, ATD., M.T.

NIP 196711121991031002